



PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN INTERNASIONAL: TINJAUAN GEOPOLITIK DAN POTENSI ANCAMAN

Yusep Ginanjar^{1*}, Agus Subagyo¹

¹ Program Studi Hubungan Internasional; Universitas Jenderal Ahmad Yani; Indonesia

*email: yusep.ginanjar@lecture.unjani.ac.id

Abstract

This research has the main objective of conducting a strategic review of the relocation of Indonesia's capital city to the East Kalimantan, where the review focuses on the geopolitical aspects, potential threats arising from the complexity of security in the Indo-Pacific, and how to develop defense strategies for the future Nusantara. This research uses Mearsheimer's Defensive Realism Theory, as well as the Regional Security Complex Theory from Buzan to show that national security cannot be achieved if a country does not pay attention to regional security. The findings and analysis of the research show that geostrategically the position of the Nusantara is very vulnerable, this is due to its position in the center of the Indo-Pacific region with all the existing security issues. In this condition, air and sea dimensions become the main source of threat considering the conflict between the United States and China, so that Indonesia makes adjustments to the existing defense paradigm.

Keywords: *defense strategy; Indo-Pacific; Nusantara capital city; regional security complex*

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk melakukan tinjauan strategis terhadap pemindahan ibu kota negara Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur, yang mana tinjauan difokuskan dalam aspek geopolitik Ibu Kota Nusantara, potensi ancaman yang muncul dari kompleksitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik, hingga bagaimana perkembangan strategi pertahanan untuk membentuk masa depan Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menggunakan teori Realisme Defensif dari Mearsheimer, serta teori *Regional Security Complex* dari Buzan untuk menunjukkan bahwa keamanan nasional tidak dapat diraih apabila suatu negara tidak memperhatikan keamanan regional. Temuan dan analisis studi menunjukkan bahwa secara geostrategis posisi Ibu Kota Nusantara sangatlah rawan, kondisi ini dikarenakan posisinya yang ada di pusat kawasan Indo-Pasifik dengan segala kompleksitas isu keamanan yang mengemuka. Pada kondisi ini matra udara dan laut menjadi sumber ancaman utama mengingat perkembangan konflik Amerika Serikat dan Cina, sehingga dengan itu Indonesia melakukan penyesuaian pada paradigma pertahanan yang ada.

Kata Kunci: Ibu Kota Nusantara; Indo-Pasifik; *regional security complex*; strategi pertahanan

Pendahuluan

Ibu kota suatu negara merupakan wilayah pusat yang dimiliki sebuah negara untuk melaksanakan berbagai aktivitas secara komprehensif, dalam hal ini ibu kota memiliki peranan sebagai pusat pemerintahan yang perlu memiliki dukungan kekuatan secara politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, setiap ibu kota yang dimiliki oleh suatu negara diharapkan berada dalam kondisi yang prima sehingga dapat menopang seluruh kegiatan secara nasional dan bahkan internasional. Kelayakan sebuah wilayah sebagai ibu kota suatu negara perlu ditinjau melalui berbagai aspek yang ada, hal ini penting mengingat ibu kota merupakan pusat kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan bahkan diplomatik suatu negara yang dapat mempengaruhi keadaan suatu negara secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai kelayakan ibu kota menjadi sesuatu yang sangat biasa terjadi di berbagai negara di dunia. Pemindahan ibu kota negara akan sangat berdampak pada struktur masyarakat, cara hidup, serta aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat, kondisi ini berkaitan dengan pentingnya pertimbangan pada seluruh faktor pendukung yang mendorong perpindahan ibu kota. Oleh karena itu, keputusan untuk memindahkan ibu kota diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan (FISIP Universitas Indonesia, 2020).

Pemindahan ibu kota suatu negara merupakan hal yang wajar terjadi dalam dunia internasional, kondisi tersebut terjadi atas berbagai latar belakang atau alasan yang ada. Pemindahan ibu kota Amerika Serikat dari New York ke Washington DC dilihat sebagai salah satu inspirasi besar bagi Indonesia, pemindahan ibu kota tersebut mendapatkan izin dari konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1790 atas alasan untuk memisahkan pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis (ekonomi). Selain itu, New York dilihat sebagai salah satu kota yang sangat padat mengingat sejak awal kota tersebut merupakan pintu utama bagi para imigran untuk masuk ke Amerika Serikat dan berkembang menjadi pusat bisnis, budaya, industri, transportasi, dan manufaktur (Simorangkir, 2017). Selain itu, pemindahan ibu kota pun dapat kita lihat dari alasan lainnya seperti yang terjadi kepada negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara yaitu Myanmar. Pada tahun 2005 penguasa militer Myanmar memindahkan ibu kota mereka dari Yangon ke sebuah kota di kawasan Utara yang saat ini dikenal dengan Naypyidaw, pemindahan tersebut diakibatkan karena munculnya beberapa kondisi yang

memunculkan potensi serangan asing dari wilayah laut mereka yang dekat dengan kota Yangon (Sorongan, 2022). Pada akhirnya dapat terlihat bahwa, pemindahan ibu kota suatu negara dilatarbelakangi oleh berbagai alasan seperti aspek pertahanan dan pengalihan fokus.

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tujuan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara, ide pemindahan tersebut telah muncul sejak tanggal 17 Juli 1957 saat Presiden Soekarno menginginkan Palangkaraya menjadi ibu kota dengan alasan wilayahnya yang luas dan posisinya di tengah kepulauan Indonesia. Ide pemindahan tersebut tidak pernah terwujud, karena pada akhirnya Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964 pada tanggal 22 Juni tahun 1964. Setelah itu secara berturut-turut konstitusi kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) mulai dari UU No. 11 Tahun 1990, UU No. 34 Tahun 1999, hingga terakhir yang masih berlaku adalah UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bappenas, 2020). Pada era Orde Baru tahun 1990-an, ide pemindahan ibu kota pun pernah ada walaupun tidak digarap secara serius yang bahkan memilih daerah Jonggol sebagai tujuannya. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan ibu kota pun kembali muncul dikarenakan segala permasalahan yang melanda Jakarta seperti kemacetan dan banjir. Namun, pada saat itu muncul opsi untuk tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan dengan melakukan berbagai pembenahan, atau opsi lainnya dengan tetap memindahkan pusat pemerintahan ke daerah lain yang tidak pernah terwujud.

Pemindahan ibu kota ke Nusantara mulai digarap secara serius pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan ini diputuskan pada tanggal 29 April 2019 terkait pemindahan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pada tanggal 18 Januari 2022 disahkanlah RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang oleh DPR RI, dasar hukum pada pemindahan ibu kota ini dikenal dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Kementerian Keuangan RI, 2022). Pemindahan ibu kota didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyimpulkan

bahwa DKI Jakarta sudah tidak lagi optimal dalam mengemban peran sebagai ibu kota, kondisi ini dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, hingga ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia (Bappenas, 2020).

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa lokasi pasti calon ibu kota baru Indonesia berada di wilayah Kalimantan Timur, secara lebih pasti lokasinya berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemilihan tersebut didasari oleh beberapa alasan seperti resiko bencana alam yang minimal, lokasi yang strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia, dekat dengan beberapa wilayah perkotaan penunjang, hingga tersedianya lahan yang dikuasai oleh pemerintah seluas 180 ribu hektar. Joko Widodo mengharapkan agar pemindahan ini bukan hanya sebagai bentuk mengurangi kesenjangan di antara Pulau Jawa dan luar Jawa, melainkan sebagai bentuk baru industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam di Indonesia (Asmara, 2019). Pemindahan ibu kota Indonesia pun disampaikan memiliki tiga urgensi utama. *Pertama*, pembangunan ibu kota yang baru dibutuhkan untuk mendorong transformasi ekonomi mengingat dalam Visi Indonesia Maju tahun 2045 Indonesia akan masuk dalam 5 besar ekonomi dunia tahun 2045. *Kedua*, pembangunan ibu kota mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. *Ketiga*, kondisi objektif Jakarta yang dinilai sudah tidak cocok menjadi ibu kota karena kepadatan penduduknya, kemacetan lalu lintasnya, hingga permasalahan lingkungan dan geologi di wilayah tersebut (Kementerian Keuangan RI, 2022). Oleh karena itu, pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh Indonesia diharapkan memberi dampak yang positif bagi pembangunan nasional.

Pemindahan ibu kota menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibahas, mengingat ibu kota menjadi objek vital bagi suatu negara sebagai pusat dari segala kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. Namun, pemindahan yang dilakukan tidak hanya mengenai pembangunan fisik dan administratif karena di sisi lain aspek pertahanan dan keamanan negara memainkan peran penting di sini. Pemindahan ibu kota akan memunculkan berbagai tantangan dalam aspek pertahanan seperti potensi ancaman keamanan baru, kebutuhan infrastruktur pertahanan yang memadai, hingga memastikan

koordinasi antar lembaga untuk menjaga stabilitas keamanan (Sundari, 2024). Oleh karena itu, aspek pertahanan menjadi sesuatu yang perlu dititikberatkan dalam pemindahan ibu kota negara. Pada keadaan ini ibu kota negara akan menjadi markas utama dari kekuatan militer yang mereka miliki, sehingga diperlukan sebuah sistem pertahanan yang memumpuni agar dapat menghadapi situasi dan fenomena ancaman yang muncul secara internal maupun eksternal. Pemindahan ibu kota Indonesia ke kawasan Kalimantan memang terlihat sebagai upaya yang cukup “berani”, karena pada dasarnya membuat ibu kota negara semakin dekat dengan kawasan negara tetangga terutama Malaysia yang bahkan berbatasan secara langsung di utara pulau Kalimantan. Pandangan geopolitik menjadi sangat penting untuk meninjau lebih lanjut penempatan ibu kota yang baru, dengan tujuan untuk memperluas tinjauan potensi ancaman dan pembentukan strategi di masa yang akan datang.

Melalui perspektif hubungan internasional, kondisi strategis suatu ibu kota dapat terlihat dengan jelas dalam kondisi konflik (perang). Pada keadaan ini telah menjadi suatu rumus pasti apabila suatu pasukan dapat menguasai ibu kota pihak lawannya, maka sebagian besar kekuatan musuh akan menurun dan meningkatkan peluang untuk menang (berkuasa). Kondisi ini dapat terlihat dari kondisi Cina pada masa lalu, saat itu pemerintahan dibuat terpusat dengan adanya fleksibilitas pada tingkat provinsi, keadaan ini dilakukan karena kesadaran bahwa suatu dinasti dapat runtuh apabila ibu kotanya ambruk. Oleh karena itu, Dinasti Ming pernah memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Beijing dengan tujuan utama dapat mengontrol musuh yang berasal dari Mongol dan Manchus (Sutikno, 2007). Melalui beberapa contoh dari berbagai pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, terdapat sebuah motif yang sama untuk dapat menghindari bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara tersebut. Kondisi ini berbeda dengan niat utama Indonesia yang memindahkan ibu kota atas dasar pemerataan ekonomi dan kondisi ibu kota sebelumnya yang sudah terlalu padat. Melalui perspektif ini, penulis mengangkat sebuah permasalahan di mana pada dasarnya tetap bahwa aspek pertahanan perlu dikedepankan dalam penentuan lokasi ibu kota. Pada keadaan ini, meninjau apakah pemilihan pula Kalimantan telah tepat atau justru dalam keadaan ini Indonesia perlu melakukan berbagai penyesuaian yang strategis.

Metodologi

Realisme Defensif

Realisme defensif merupakan sebuah aliran pemikiran yang memiliki asumsi tradisional tentang sistem dunia yang anarki di mana negara harus meningkatkan kapabilitasnya untuk mencapai rasa aman, dalam aliran ini dijelaskan bahwa kondisi tersebut membuat setiap negara mengadopsi strategi defensif untuk melindungi keamanannya (Lobell, 2010). Waltz menjelaskan bahwa realisme defensif adalah posisi di saat suatu negara akan lebih bertindak secara defensif untuk mempertahankan kedaulatan negaranya, daripada melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu *balance of power* dan *status quo* yang ada. Waltz berpendapat bahwa setiap negara berkepentingan untuk menjaga posisi mereka dalam sistem, yang mana hal ini terjadi dalam kondisi dilema keamanan pada sistem internasional yang anarki (Waltz, 1979). Kondisi yang anarki dalam sistem internasional ini juga menjadikan negara harus mampu menerapkan istilah *self-help*, sehingga negara mampu melindungi dirinya sendiri dengan meningkatkan kapabilitas pertahanannya masing-masing. Mengenai kondisi tersebut, Jervis (2016: 5) menjelaskan dalam kondisi ini bahwa “*because international politics is a self-help system in which each state must be prepared to rely on its own resources and strength to further its interest, national leaders often seek to become more powerful than their potential adversaries*”.

Mearsheimer menjelaskan bahwa setiap negara dalam kerangka pemikiran realisme defensif cenderung responsif terhadap dinamika ancaman yang terjadi di sekitarnya, sehingga ditekankan bahwa setiap negara akan berupaya untuk mempertahankan posisi mereka dalam sistem internasional dengan cara yang defensif. Keamanan regional menjadi sebuah kondisi yang diperhatikan dalam aliran pemikiran ini, berkaitan dengan suatu negara yang cukup mempertahankan kondisi *balance of power* atau menggunakan strategi realisme defensif untuk mempertahankan kedaulatannya (Mearsheimer, 2001). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam konteks pemindahan ibu kota ini Indonesia memiliki kepentingan untuk mempertahankan keamanan negaranya. Pada keadaan ini Indonesia melihat adanya kompleksitas keamanan yang tinggi di kawasan Indo-Pasifik sebagai suatu potensi ancaman yang nyata, dibuktikan dengan berbagai aktivitas militer aktif yang terjadi

pada sengketa di Laut Cina Selatan maupun benturan kepentingan di antara Amerika Serikat dan Cina di kawasan. Pada kondisi lain Indonesia terlihat cukup terbagi fokusnya karena sedang berada pada masa transisi hingga setiap keputusan vital telah terlaksana, oleh karena itu menjadi penting bagi Indonesia untuk mengeluarkan sebuah strategi pertahanan yang memumpuni untuk dapat mempertahankan diri dari potensi ancaman yang ada di sekitarnya.

Pertahanan merupakan sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan wilayah dan sumber daya suatu negara dari serangan eksternal, dalam konteks pertahanan ini posisi geografis menjadi sesuatu yang penting untuk dapat dioptimalkan oleh sebuah negara untuk posisi pertahanan yang lebih baik. Pada akhirnya, strategi pertahanan merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan wilayah dan sumber daya suatu negara dari ancaman eksternal dengan menekankan aspek geografis di dalamnya (Clausewitz, 1984). Konsep tersebut semakin menekankan tentang adanya upaya Indonesia untuk membentuk suatu strategi pertahanan yang didasari oleh kepentingan yang dimilikinya, yakni untuk mempertahankan aspek pertahanan dan keamanan wilayahnya dari berbagai potensi ancaman eksternal yang mengemuka. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengembangkan perencanaan strategi pertahanan dalam upaya pemindahan ibu kota ke Nusantara. Pengembangan tersebut didukung dengan pentingnya aspek geografis yang ada, karena melalui pemindahan yang terjadi secara geografis pusat pemerintahan dan pertahanan Indonesia justru “mendekat” pada sumber potensi ancaman yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan. Strategi defensif yang dilakukan oleh Indonesia dibentuk untuk mempertahankan kedaulatan negara, bukan untuk mengubah *status quo* yang ada di kawasan Indo-Pasifik yang dapat menimbulkan ketegangan lebih lanjut dari berbagai permasalahan yang terjadi saat ini.

Regional Security Complex Theory

Regional Security Complex Theory (RSCT) merupakan penjelasan terhadap adanya pembentukan suatu kondisi dalam sebuah wilayah berdasarkan tingkat permusuhan atau persahabatan yang ada. *Amity* merupakan istilah yang mengacu pada hubungan antarnegara yang cukup harmonis dengan berbagai bentuk dukungan yang ada, sedangkan di sisi lain terdapat istilah *enmity* yang menjelaskan bahwa hubungan

antarnegara didasari oleh ketakutan dan kecurigaan sehingga hubungan antarnegara menjadi cukup konflikual. Pada akhirnya pola persahabatan dan permusuhan antarnegara muncul dari adanya fenomena historikal yang ada, dalam hal ini dapat terbentuk melalui adanya keberpihakan ideologis hingga sengketa teritorial (Buzan & Waeber, 2003). Pada akhirnya pembahasan mengenai RSCT menjelaskan tentang adanya kondisi keamanan yang kompleks dalam sebuah wilayah, yang mana terdapat sebuah kelompok negara dengan masalah keamanan utamanya yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kondisi keamanan yang kompleks dalam teori ini didasari oleh adanya fenomena empiris dengan sumber historis (akar sejarah) dan geopolitik.

Regional Security Complex menjelaskan bahwa interaksi pada sebuah kawasan lebih dilihat melalui aspek keamanan, sehingga suatu wilayah akan didefinisikan sesuai dengan pengaruhnya dalam suatu isu keamanan (Lake & Morgan, 1997). Kondisi keamanan tersebut tentunya dipengaruhi dengan adanya hubungan antarnegara pada sebuah kawasan, yang mana RSCT memperkenalkan konsep *amity* dan *enmity*. *Amity* menjelaskan tentang adanya hubungan antarnegara yang didasari persahabatan sehingga berekspektasi pada dukungan dan perlindungan satu sama lain, sedangkan *enmity* menunjukkan sebuah hubungan yang terjalin atas kecurigaan dan rasa takut sehingga menimbulkan kondisi hubungan yang buruk antarnegara. Pola *enmity* yang menunjukkan hubungan buruk antarnegara berperan dalam fokus keamanan pada RSCT, keadaan ini memunculkan spektrum ancaman yang menyebabkan setiap negara perlu untuk memperhatikan aspek keamanan yang berkaitan dengan kawasannya.

Regional Security Complex menunjukkan adanya kondisi regional yang dipenuhi dengan permasalahan keamanan yang sangat kompleks, yang mana isu-isu tersebut akan terkontruksi secara terus-menerus hingga akhirnya menjadi sebuah ancaman bagi keamanan negara-negara di kawasan tersebut. Teori ini pada akhirnya menjelaskan bagaimana perkembangan interaksi terjadi dalam sebuah kawasan, yang mana hal ini dilakukan dengan melihat adanya kondisi keamanan wilayah yang menjadi permasalahan bersama. Buzan menekankan bahwa RSC menekankan signifikansi regional melalui ketergantungan pola keamanan, sehingga akhirnya *primary security* negara-negara dalam suatu kawasan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan membentuk konsepsi keamanan regional (Buzan, 1991). Oleh karena itu, secara teoritis

dijelaskan bahwa keamanan nasional suatu negara tidak akan tercapai apabila suatu negara mengabaikan kondisi keamanan wilayahnya (keamanan regional).

Aspek historis dan geopolitik memainkan peran penting dalam RSC, melalui aspek historis hubungan antarnegara dalam sebuah kawasan dapat dianalisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi sumber dari pola hubungan yang terjadi. Aspek lainnya yakni geopolitik menunjukkan hubungan erat antara kondisi geografis, keadaan politik dan strategi, kebijakan negara, hingga hubungan timbal balik di antara aspek-aspek tersebut (Flint, 2021). Salah satu peranan politik dalam geopolitik menunjukkan adanya kondisi alam sebuah negara yang mempengaruhi pembentukan kebijakan luar dan dalam negeri, sehingga peranan inilah yang digunakan dalam analisis terkait pemindahan ibu kota ke Nusantara. Kondisi geopolitik suatu ibu kota negara dapat dipahami dalam konsep *Center of Gravity* (CoG), konsep ini menjelaskan bahwa ibu kota merupakan pusat kekuatan sebuah negara sehingga akan berakibat fatal apabila dilumpuhkan. CoG meliputi lima aspek utama yang didasari oleh doktrin *effect-based operation* Amerika Serikat yaitu militer di medan tempur, populasi, infrastruktur, dan komponen penting seperti pusat ekonomi dan kepemimpinan politik (Mets, 1999). RSCT pada akhirnya digunakan untuk menjelaskan bagaimana kondisi kompleks keamanan kawasan yang semakin meningkat di sekitar Indonesia, dalam hal ini lokasi Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan akan bertemu langsung dengan pusat kompleksitas keamanan wilayah pada kondisi di Indo-Pasifik dan sengketa yang masih terjadi di kawasan Laut Cina Selatan.

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk berfokus pada perilaku sosial dari subjek penelitian, yakni membahas sudut pandang terhadap suatu fenomena, peristiwa, kejadian, maupun studi kasus dengan basis data yang relevan untuk menunjukkan potensi dari penelitian yang dilaksanakan (Creswell & David, 2018). Tipe penelitian deskriptif analisis digunakan untuk menjelaskan fenomena dan permasalahan yang ada melalui catatan, analisis, uraian kata, penggambaran, hingga interpretasi yang analitis terhadap fenomena atau peristiwa yang terjadi (Mardalis, 1995). Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yaitu lembaga pemerintah

(kementerian), laporan lembaga non-pemerintah (lembaga penelitian dan pendidikan), artikel jurnal terkait dari berbagai universitas, hingga media massa yang dapat diakses secara daring. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, pemetaan data-data yang dikumpulkan, interpretasi deskriptif data, serta menganalisis data hingga akhirnya dapat menuliskan temuan dalam penelitian yang dilaksanakan (Creswell & Poth, 2017).

Metode penelitian tersebut digunakan oleh peneliti untuk menganalisis fenomena pemindahan ibu kota Indonesia, yang mana tiga aspek utama yaitu tinjauan geopolitik di kawasan, potensi ancaman, hingga pengembangan sistem dan strategi pertahanan yang dimiliki Indonesia menjadi pembahasan penting untuk menjamin aspek pertahanan dan keamanan Ibu Kota Nusantara di masa yang akan datang. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai tinjauan terhadap sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam studi hubungan internasional, yang mana pemindahan ibu kota ke Nusantara menjadi sebuah fenomena yang memiliki dampak besar terhadap berbagai aspek terutama geopolitik, pertahanan, dan keamanan. Metode ini digunakan peneliti untuk menunjukkan bagaimana pemindahan ibu kota dipengaruhi oleh berbagai aspek tertentu yang harus diperhatikan oleh para pengambil kebijakan, terutama dalam meningkatkan sistem dan strategi pertahanan mengingat kompleksitas di kawasan yang berpotensi memberikan ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Metode kualitatif digunakan dengan tujuan memahami permasalahan beserta konteks sosialnya, sehingga memberikan gambaran yang menyeluruh (komprehensif) dan kompleks terhadap kondisi yang sedang terjadi sebagai objek penelitian (Creswell, 2008).

Pembahasan

Implikasi Geopolitik Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara

Letak geografis Indonesia dapat dilihat sebagai salah satu yang sangat strategis, di mana kita mengetahui bahwa Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Oleh karena itu, secara keseluruhan pun Indonesia memiliki posisi yang strategis berada di jantung kawasan Indo-Pasifik yang menjadi sebuah istilah baru dalam studi geopolitik dewasa ini. Secara mendasar, geopolitik dipahami sebagai studi yang melihat adanya hubungan erat di antara letak geografis suatu negara dengan aspek politik yang terjadi di dalamnya. Pada kondisi ini letak geografis dan teritorial suatu negara, akan memberikan

pengaruh yang besar terhadap proses pengambilan keputusan bagi kebijakan luar negeri suatu negara. Khasan Ashari menjelaskan bahwa geopolitik membahas mengenai faktor geografis yang mempengaruhi tindakan negara dalam kebijakan politiknya, sehingga letak geografis, iklim, sumber daya alam, hingga kondisi alam mempengaruhi negara dalam menentukan kebijakan luar negerinya yang sesuai dengan posisi negara tersebut dalam sistem internasional (Ashari, 2020). Oleh karena itu, pada bagian ini pembahasan berfokus pada bagaimana posisi geografis Indonesia dalam dunia internasional akan mempengaruhi kebijakan politik yang dikeluarkan sesuai dengan posisi tersebut.

Berbagai kondisi yang terjadi di sekitar kawasan menjadi sesuatu yang berpengaruh bagi aspek politik Indonesia, sehingga pemindahan ibu kota ke kawasan Kalimantan sudah seharusnya diikuti oleh kebijakan politik yang sesuai. Kondisi ini mengingatkan bahwa Ibu Kota Nusantara saat ini memang berada di tengah-tengah negara Indonesia, namun di sisi lain semakin mendekati sumber potensi ancaman yang berada di kawasan. Pemindahan ibu kota ke kawasan Kalimantan tentunya terlihat sebagai transformasi geopolitik yang dilakukan oleh Indonesia, kondisi ini tentu mengundang adanya tanggapan dari berbagai pihak termasuk negara tetangga. Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamad Sabu menjelaskan bahwa Malaysia tidak melihat pemindahan ibu kota ke Nusantara sebagai sebuah bentuk ancaman keamanan, melainkan menjadi keuntungan bagi mereka untuk meningkatkan sektor ekonomi terutama dalam aspek pariwisata. Namun, di sisi lain diketahui bahwa militer Malaysia tetap memperketat pengamanan di perbatasan dengan Indonesia menyusul rencana perpindahan ibu kota tersebut (CNN Indonesia, 2020). Oleh karena itu, tentu dalam kondisi ini kita dapat melihat bahwa perpindahan Ibu Kota Nusantara dipandang sebagai langkah strategis oleh pihak lain. Sehingga dengan kondisi ini Indonesia pun harus dapat dengan bijak memainkan perspektif ancaman agar tidak tercipta gesekan di masa yang akan datang.

Ancaman dalam (intranegara) dan luar negeri (antarnegara) menjadi sesuatu yang dialami oleh Jakarta maupun Nusantara sebagai ibu kota Indonesia, pada kondisi ini Bappenas menjelaskan bahwa potensi ancaman agresi masih sangat mungkin dan melibatkan tiga matra. Selain itu, Nusantara berada di kawasan di mana pelanggaran wilayah menjadi suatu ancaman besar terhadap pertahanan Nusantara, seperti halnya jenis ancaman kejahatan transnasional mengingat Nusantara yang berdekatan dengan Sulu, Sabah, dan Poso yang dikenal sebagai lokasi perkembangan dari kelompok-

kelompok teroris. Jenis perkembangan ancaman yang dialami oleh Ibu Kota Nusantara atas implikasi geopolitiknya berada pada kuadran yang kompleks, di mana perkembangan konflik intranegara dan antarnegara meningkat dengan kuantitas yang cukup besar sehingga diperlukan strategi nyata untuk mengatasinya (Maharani, 2022). Implikasi utama dalam kondisi geopolitik Ibu Kota Nusantara sangat terasa dalam perkembangan potensi ancaman yang sangat kompleks, karena pada keadaan ini kondisi geografis di kawasan tersebut sangat mendukung adanya kombinasi ancaman yang menjadikan upaya pertahanan dan keamanan di Nusantara menjadi sangat meningkat.

Pemindahan ibu kota yang dilakukan suatu negara akan memberikan implikasi yang sangat besar dalam aspek geopolitik, secara kompleks pemindahan ibu kota suatu negara akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan tentunya keamanan baik di dalam maupun di luar negeri. Pada pemindahan ibu kota ini tentu saja orientasi kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah akan berubah, seperti halnya pembangunan yang difokuskan di kawasan ibu kota baru sebagai bentuk pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, tentu saja kebijakan luar negeri pun menjadi salah satu aspek yang terpengaruhi oleh pemindahan ibu kota tersebut. Pada keadaan ini pemindahan ibu kota akan menyebabkan penyesuaian yang komprehensif dalam berbagai sektor, keadaan ini sangat berkaitan dengan pengembangan infrastruktur, distribusi sumber daya, hingga konektivitas regional karena memiliki dampak bagi hubungan bilateral maupun multilateral di antara Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu, perlu dibentuk sebuah strategi yang matang agar perpindahan ibu kota yang dilakukan oleh Indonesia dapat menjadi sebuah keputusan tepat yang tidak mengganggu hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.

Pembahasan mengenai hubungan Indonesia dengan negara-negara lainnya dapat dibahas sebagai aspek diplomatik yang melekat dalam prinsip hukum internasional, Komisi Hukum Internasional menjelaskan bahwa bentuk terbaik mengadakan hubungan diplomatik antarnegara adalah dengan mendirikan misi diplomatik tetap (*ambasade/legation*). Walaupun, dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa bentuk hubungan ini dapat dilakukan dengan bentuk dan cara yang lain (Soeryono & Ariesoendha, 1989). Kondisi tersebut menjadi salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan dalam membahas pemindahan ibu kota suatu negara, sehingga diperlukan

sebuah rencana strategis dalam pemindahan gedung kedutaan besar negara asing yang relevan dengan kondisi wilayah dan infrastruktur di kawasan ibu kota yang baru. Kondisi ini tentu masih termasuk dalam implikasi geopolitik dari perpindahan Ibu Kota Nusantara, aspek geografis dari pemindahan ibu kota berpengaruh pada aspek politik di mana Indonesia perlu memperhatikan bagaimana kebijakan yang baik untuk menjaga harmonisasi hubungan dengan negara-negara lain.

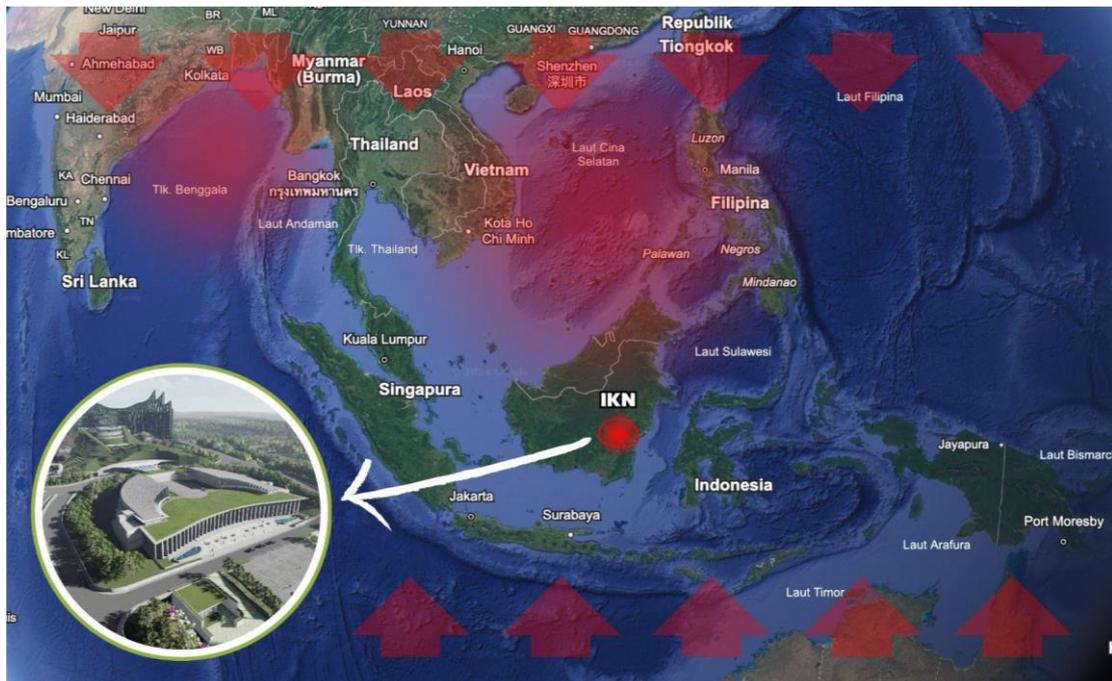
Secara tinjauan geopolitik terhadap pemindahan ibu kota ke Nusantara yang terjadi, kondisi ini pun dapat dikaitkan dengan keadaan di mana pemindahan ini harus disesuaikan dengan identitas yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Pada keadaan ini Indonesia merupakan negara kepulauan dengan visi untuk menjadi Poros Maritim Dunia, sehingga setidaknya secara geopolitik pemindahan tersebut perlu disesuaikan pula dengan kepentingan dan tujuan nasional Indonesia. Pada keadaan ini secara geografis pemindahan dilakukan ke kawasan Kalimantan Timur yang secara nyata berada di tengah wilayah Indonesia, secara geografis wilayah tersebut dekat dengan wilayah laut Indonesia sehingga diharapkan dapat menjadi hal positif bagi kebijakan-kebijakan laut Indonesia di masa yang akan datang. Pada akhirnya Indonesia tinggal memikirkan bagaimana infrastruktur penunjang untuk melancarkan rencana yang ada, sehingga wilayah-wilayah di sekitar Ibu Kota Nusantara perlu diperhatikan betul sehingga dapat menopang kepentingan Indonesia dalam aspek kelautan. Secara domestik pun, perpindahan ini dianggap telah sesuai secara geopolitik. Di samping lokasinya yang tepat berada di tengah Indonesia, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pun menjelaskan bahwa lokasi yang telah diputuskan di Kalimantan Timur, merupakan lokasi yang minim bencana alam terutama gempa bumi (ANTARA News, 2019).

Kompleksitas Isu Keamanan Indo-Pasifik dan Dampaknya bagi Ibu Kota Nusantara

Pada dasar teori yang dibahas dalam *Regional Security Complex* dijelaskan bahwa keamanan nasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh keamanan di wilayahnya (regional), tentu saja hal ini dirasakan oleh Indonesia dengan wilayah negaranya yang secara geografis menjadi pusat dari aktivitas kawasan Indo-Pasifik. Pada keadaan ini kompleksitas dari isu-isu yang berkembang di kawasan tentu saja menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dalam proses pemindahan ibu kota ke Nusantara, kondisi ini menjadi

pembahasan lebih lanjut dari tinjauan geopolitik yang semakin terfokus dalam perspektif hubungan internasional. Pada kondisi ini terlebih kita melihat bahwa aspek pertahanan dan keamanan merupakan sesuatu yang paling penting bagi keberlangsungan hidup suatu negara, kemampuan untuk bertahan (*survival*) menjadi dasar yang perlu dicapai terlebih dahulu sebelum sebuah negara dapat berkembang sesuai dengan arah dari tujuan dan kepentingan nasionalnya. Pada bagian ini dibahas mengenai adanya kompleksitas keamanan yang kian meningkat di kawasan Indo-Pasifik, sehingga dalam keadaan ini penulis berusaha melihat dampak dari kompleksitas tersebut terhadap kebijakan yang harus diambil dalam pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan.

Gambar 1 Lokasi Ibu Kota Nusantara dan Tinjauan terhadap Kondisi Kawasan



Pada gambar di atas kita dapat melihat Indonesia dengan lokasi geografisnya di kawasan Indo-Pasifik, kondisi tersebut yang menjadi dasar bagi tinjauan geopolitik dalam pemindahan ibu kota ke Nusantara. Indo-Pasifik sendiri menjadi sebuah istilah baru dalam dunia geopolitik, kawasan ini meliputi Samudera Hindia, Samudera Pasifik, Asia Daratan, Asia Tenggara, Australia, Asia Timur, bahkan muncul berbagai kepentingan dari negara-negara maju seperti Cina, Amerika Serikat, dan Kanada. Indo-Pasifik sendiri merupakan sebuah area pusat dalam isu geopolitik maritim, keamanan,

perdagangan, dan kegiatan lingkungan. Wilayah Indo-Pasifik merupakan persimpangan utama dalam perdagangan internasional, setiap tahunnya terdapat sekitar 32,2 juta barel minyak mentah yang melewati kawasan tersebut dan 40% nilai total ekspor global berasal dari kawasan ini (Tertia & Perwita, 2018). Dengan meningkatnya kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, negara-negara eksportir saling berkompetisi untuk memasarkan produknya di kawasan tersebut. Persaingan itu tidak terbatas pada tingkat perdagangan internasional, namun juga pada investasi langsung ke sejumlah pasar di Indo-Pasifik untuk jaringan distribusi, industri manufaktur serta investasi pembangunan prasarana ekonomi seperti pelabuhan, jalan raya, jalur kereta api, pembangkit listrik, serta sarana lain seperti layanan keuangan dan perbankan (Montrama, 2016).

Kondisi geostrategis yang dimiliki oleh kawasan Indo-Pasifik menyebabkan kawasan tersebut menjadi perhatian bagi kekuatan-kekuatan dunia, sehingga kawasan ini bertransformasi menjadi medan baru bagi pertarungan kepentingan di antara negara-negara besar dunia. Istilah kawasan Indo-Pasifik sendiri didasari oleh konsep pandangan geografis yang dipadukan dengan ekonomi, sehingga muncul peluang kemunculan geo-ekonomi yang besar dalam kompleksitas keamanan yang ada. Kondisi tersebut ternyata tidak hanya berdampak bagi kawasan Asia, namun cukup meluas sehingga muncul sebuah konstruksi kawasan baru yang disebut dengan Indo-Pasifik. Gambaran umum dari kawasan ini menjelaskan adanya gabungan dari Samudera Hindia dan wilayah Pasifik Barat, termasuk dengan kawasan di sekitar laut kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara yang menjadi bagian dari konstruksi regional tunggal bernama Indo-Pasifik (Khurana, 2017). Kawasan Indo-Pasifik menjadi salah satu istilah geopolitik yang paling berkembang dan diperhatikan, hal ini dikarenakan kompleksitas kawasan tersebut yang selalu membuka berbagai celah perkembangan di dalamnya.

Perkembangan militer dan ekonomi Cina dilihat sebagai awal dari kompleksitas isu keamanan di kawasan Indo-Pasifik, dalam keadaan ini Cina semakin gencar untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangannya. Cina mulai menjelma menjadi raksasa di kawasan dan mulai menyebar pengaruhnya, kondisi ini tentu saja “tidak disukai” oleh berbagai pihak terutama Amerika Serikat yang merasa hegemoninya terganggu oleh keberadaan Cina. Rivalitas di antara Amerika Serikat dan Cina semakin mengalami perkembangan di kawasan seperti melalui Perang Dagang yang masih terjadi hingga saat ini, selain itu muncul pula perkembangan aliansi

Amerika Serikat seperti AUKUS dan Quad yang dilihat sebagai respons terhadap ekspansi yang dilakukan oleh Cina. Konflik yang terjadi di kawasan pun semakin meluas dengan adanya keterlibatan berbagai pihak lain seperti India, Jepang, dan Australia yang semakin meningkatkan tensi konflik di kawasan. Oleh karena itu, rivalitas yang terjadi di antara Amerika Serikat dan Cina menjelma menjadi konflik yang masih eksis hingga saat ini. Terlebih terjadi perluasan melalui beberapa perang *proxy* yang terjadi seperti perpanjangan konflik Cina-Taiwan, Korea Selatan-Korea Utara, dan perkembangan konflik lainnya.

Pada konflik yang terjadi di antara Cina dan Amerika Serikat, Indonesia memang tidak terlibat secara langsung di dalamnya. Namun, dampak yang muncul tentunya cukup terasa seperti dengan meningkatnya aktivitas uji coba militer yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan. Kondisi ini semakin meluas seperti pada konflik yang belum selesai di antara Korea Utara dan Korea Selatan, kedua negara hingga saat ini saling meningkatkan aktivitas militernya masing-masing. Pada akhir Oktober tahun 2022, kedua negara bahkan saling menembakan beberapa peluncur roketnya sebagai skema *deterrence* dan *counter deterrence* di antara kedua negara. Korea Utara menjadi negara yang semakin aktif melakukan aktivitas militer di kawasan, hal ini menyebabkan Amerika Serikat bertindak dengan melakukan pembicaraan trilateral bersama Jepang dan Korea Selatan untuk membahas kondisi yang sedang terjadi (Deutsche Welle, 2022). Perkembangan konflik tersebut semakin meningkatkan kondisi dilema keamanan di kawasan Indo-Pasifik, yang mana kecurigaan di antara negara-negara kawasan semakin meningkat sehingga mereka terus meningkatkan kapabilitas militernya masing-masing. Kondisi ini tentu saja menjadi salah satu bentuk potensi ancaman yang dapat meluas dan memberikan dampak langsung bagi Indonesia.

Kondisi lainnya yang meningkatkan kompleksitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik merupakan beberapa konflik terdahulu yang masih eksis hingga saat ini, yakni perkembangan konflik dan sengketa di Laut Cina Selatan serta peningkatan kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang cukup strategis dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan berbagai negara seperti Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan tentu Cina itu sendiri. Pada keadaan ini muncul berbagai tumpang tindih yuridiksi atas klaim di kawasan tersebut yang menyebabkan potensi konflik menjadi cukup tinggi,

oleh karena itu wilayah ini menjadi salah satu lokasi geografis paling strategis dengan segala konflik dan sengketa yang terjadi hingga saat ini (Kementerian Luar Negeri RI, 2013). Pada keadaan ini Indonesia memiliki kepentingan besar di kawasan tersebut, seperti halnya mempertahankan keamanan laut, menjaga navigasi laut sebagai jalur ekspor dan impor perdagangan Indonesia, serta tentu untuk menjaga ketahanan regional untuk menciptakan stabilitas dan ketahanan nasional Indonesia. Peningkatan konflik dan kejahatan transnasional di kawasan pun menjadi salah satu kompleksitas isu keamanan yang terjadi, seperti halnya perkembangan penyelundupan dan perkembangan terorisme yang terjadi di kawasan Laut Sulu di antara perbatasan tiga negara yaitu Filipina, Indonesia, dan Malaysia dengan masalah yang masih terjadi hingga saat ini.

Biro Hidrografi Internasional (*The International Hydrographic Bureau*) menjelaskan bahwa Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan memanjang dari barat daya ke arah timur laut, di sebelah selatan berbatasan dengan 3 derajat lintang selatan antara Sumatra dan Kalimantan, di sebelah utara dibatasi oleh Selat Taiwan ke arah pantai Fukien, Cina dengan luas perairan mencapai 4.000.000 kilometer persegi. Laut Cina Selatan memiliki perbatasan langsung dengan berbagai negara yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Filipina, Indonesia, dan Malaysia dengan berbagai gugus kepulauan yang mereka miliki yaitu Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, dan Gugus Karang Scarborough. Kawasan ini mulai disorot sepanjang dekade 1990-an sebagai salah satu isu keamanan yang menonjol, konflik di kawasan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sengketa perbatasan, jalur transportasi, hingga sengketa sumber daya alam. Kepulauan Spratly menjadi salah satu wilayah dengan sengketa paling menonjol karena melibatkan banyak negara yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Filipina (Asnani & Sukma, 1997). Konflik di Laut Cina Selatan menunjukkan sebuah akar historis dengan klaim yang mereka lakukan atas okupasi efektif para nelayan tradisional yang telah berlayar sejak tahun 200 SM, yang mana pada akhirnya klaim tersebut rumpang tindih dengan peraturan UNCLOS 1982 yang sejatinya tidak diratifikasi oleh Cina (Utomo, Prihantoro, & Adriana 2017).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Laut Cina Selatan menjadi salah satu kawasan di Indo-Pasifik yang memiliki potensi ancaman besar bagi Indonesia, akar historis dan geografis kawasan tersebut menjadi pendukung akan kondisi yang ada.

Kompleksitas yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik dapat menimbulkan berpengaruh terhadap keoptimalan pemindahan ibu kota ke Nusantara, perkembangan konflik yang terjadi di kawasan tentu akan membagi fokus Indonesia di antara meningkatkan infrastruktur di kawasan ibu kota atau justru melakukan strategi untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut. Keadaan ini menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan mengingat posisi Ibu Kota Nusantara yang seakan-akan “mendekati” sumber ancaman yang ada, di mana pada Gambar 1 terlihat bahwa posisi Ibu Kota Nusantara berada di pulau Kalimantan yang berbatasan secara langsung dengan Malaysia, Filipina, serta Laut Cina Selatan. Kondisi keamanan yang kompleks ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kelancaran pemindahan ibu kota ke Nusantara, oleh karena itu Indonesia harus memikirkan dengan baik berbagai potensi ancaman yang dapat muncul secara tiba-tiba sehingga membutuhkan strategi yang dapat mengatasi ancaman tersebut.

Pada penjelasan di atas terlihat bahwa posisi Ibu Kota Nusantara memiliki resiko tinggi dari eskalasi konflik regional yang terjadi, di mana kondisi konflik Laut Cina Selatan dan respons Amerik Serikat menjadi kondisi yang sangat rawan bagi aspek pertahanan dan keamanan. Pada kondisi ini Ibu Kota Nusantara juga ternyata rentan terhadap agresi negara asing, yang mana secara historis wilayah tersebut menjadi titik awal diinfiltrasi militer Jepang di era Perang Dunia II. Selain itu, perkembangan gerakan militer negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik juga dipertimbangkan sebagai potensi ancaman. Pada keadaan ini wilayah ibu kota Nusnatara termasuk dalam radius tiga alat militer Amerika Serikat yaitu pesawat pembom strategis, pesawat jet tempur, dan rudal jelajah. Pada sisi yang lain, wilayah Indonesia pun termasuk dalam radius rudal balistik, pesawat jet tempur, dan pesawat pembom Cina. Selain itu, sebaran pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Pasifik dan Australia pun tentu menjadi potensi ancaman bagi Indonesia. Selain itu, kawasan laut Indonesia pun menjadi jalur pelayaran bagi kapal selam konvensional maupun nuklir. Terlebih, terdapat rencana penempatan kapal selam Amerika Serikat, Inggris, dan juga Australia yang merupakan salah satu bentuk implementasi kerja sama dalam AUKUS (Maharani, 2022).

Dampak yang paling terlihat dari kompleksitas keamanan yang terjadi di kawasan terlihat pada kebijakan dan strategi yang perlu disiapkan oleh Indonesia, yakni pemindahan ibu kota ke Nusantara harus diikuti dengan adanya strategi dan kebijakan untuk mengatasi berbagai kondisi ancaman yang muncul bagi kawasan Nusantara.

Kompleksitas isu-isu keamanan di kawasan mulai dari rivalitas di antara Cina dan Amerika Serikat hingga perkembangan kejahatan transnasional menjadi perhatian utama dalam pemindahan ibu kota ke Nusantara, hal ini menjadi dampak yang harus dihadapi oleh Indonesia sehingga perlu memikirkan hal tersebut agar semakin siap dalam menjaga aspek pertahanan sekaligus secara maksimal mempersiapkan pemindahan ibu kota ke Nusantara. Nusantara akan menjadi ibu kota Indonesia yang memiliki dua kemungkinan besar yang mulai ditentukan oleh penanganannya sejak saat ini, kondisi tersebut akan memastikan posisi strategis Nusantara di masa yang akan datang. Penanganan yang maksimal dan penuh perhitungan akan menjadikan Nusantara sebagai ibu kota dengan posisi yang sangat strategis, sehingga memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia, Namun sebaliknya, penanganan yang buruk akan menjadikan Nusantara sebagai sasaran empuk bagi seluruh ancaman yang ada untuk masuk dan berkembang.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penempatan Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan disesuaikan pula dengan tujuan Indonesia dalam menjadi poros maritim dunia. Keadaan ini menjadi sebuah dukungan tersendiri dikarenakan dengan pemindahan ini ibu kota menjadi tepat berada di jantung Indonesia, yang mana hal ini membuka kemungkinan pemerintah dapat lebih baik mengatur regulasi dalam aspek maritim Indonesia. Posisi Ibu Kota Nusantara sekarang sangat strategis dan dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Lombok, dan Laut Flores. Posisi tersebut menjadi pusat pengaturan jalur laut Indonesia karena dekat dengan dua alur laut lainnya, dengan ini diharapkan pembangunan infrastruktur pelabuhan Indonesia dapat dikembangkan dengan maksimal di wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu, dengan kontrol yang maksimal dan matang dalam aspek tersebut diharapkan menjadi awal dari pencapaian visi Poros Maritim Dunia melalui pemindahan ibu kota ke Nusantara. Pembahasan ini menjadi salah satu bagian dari keterkaitan aspek geopolitik dengan pemindahan ibu kota ke Nusantara, di mana posisi yang strategis akan mendukung pembentukan kebijakan yang baik.

Regional Security Complex Theory dalam penelitian ini berperan melalui pengembangan aspek sejarah (histori) dan geopolitik yang ada, kedua aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi pengaruh besar bagi pertimbangan Indonesia dalam suksesi pemindahan ibu kota negaranya. Aspek historis yang muncul di kawasan Indo-

Pasifik dan Laut Cina Selatan menunjukkan pola *enmity* hubungan antarnegara di kawasan, yang mana dinamika keamanan di dua kawasan tersebut dapat menjadi potensi ancaman bagi Indonesia di masa yang akan datang. Kompleksitas keamanan di Indo-Pasifik semakin menunjukkan potensi ancamannya bagi Indonesia, kondisi ini semakin terlihat dari aktivitas militer yang meningkat di kawasan tersebut. Sengketa Laut Cina Selatan dan kehadiran banyak militer asing di kawasan menjadi kondisi yang perlu diperhatikan oleh Indonesia, hal ini dikarenakan Indo-Pasifik menjadi salah satu pusat ketegangan geopolitik dengan adanya negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, hingga Uni Eropa yang terlibat untuk memperkuat pengaruh dan kepentingan strategis mereka di kawasan (Ermaya, 2024). Eskalasi konflik di Laut Cina Selatan dan peningkatan aktivitas militer di kawasan Indo-Pasifik menunjukkan secara nyata pola *enmity* dalam hubungan antarnegara di kawasan, kondisi ini yang pada akhirnya memaksa Indonesia untuk meningkatkan aspek pertahanan demi menjaga kedaulatan negaranya.

Perkembangan Strategi Pertahanan bagi Masa Depan Ibu Kota Nusantara

Pengembangan strategi pertahanan yang diperlukan dalam pemindahan ibu kota ke Nusantara berkaitan dengan posisinya sebagai *Center of Gravity* (CoG) Indonesia yang baru, kondisi ini tentu akan menuntut adanya penerapan sistem pertahanan dan keamanan yang lebih modern melalui penyelenggaraan pembangunan postur pertahanan negara dan pembangunan kelembagaan. CoG suatu negara dipahami sebagai pusat pergerakan negara yang memainkan peran vital bagi keberlangsungan hidup negara tersebut, sehingga Ibu Kota Nusantara sudah seharusnya dikembangkan sebagai pusat kekuatan Indonesia mengingat status barunya. Pada akhirnya dengan pemindahan ibu kota ke Nusantara ini diperlukan berbagai strategi untuk menjaga keamanan wilayah terkait, strategi tersebut menjadi sangat penting mengingat Nusantara memiliki aspek geostrategis yang sangat tinggi di kawasan. Oleh karena itu, seluruh tindakan yang dilakukan oleh Indonesia sejak awal proses pemindahan akan memiliki dampak yang sangat besar bagi keberhasilan dan stabilitas Nusantara di masa yang akan datang.

Pengembangan sistem pertahanan Nusantara memiliki rencana untuk disinergikan dengan sistem dan strategi keamanan cerdas (*smart defence*), sistem dan strategi keamanan siber, hingga dukungan intelijen negara. Perencanaan tersebut tentu menjadi

hal yang baik bagi perkembangan ancaman tradisional dan non-tradisional yang ada, dalam hal ini pembangunan sistem pertahanan cerdas yang didasari teknologi dan sistem informasi telah menjadi sesuatu yang seharusnya diterapkan. Secara mendasar, keberadaan pusat militer dalam upaya pertahanan Ibu Kota Nusantara menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Keadaan ini mengingatkan Nusantara berada di kawasan strategis yang berbatasan dengan negara lain, namun hal ini juga meningkatkan resiko di mana Nusantara mengalami ancaman agresi dari berbagai medan. Selain itu, peningkatan kapasitas instalasi militer pun menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pertahanan Nusantara, dalam hal ini merujuk pada lapangan udara di sekitar Nusantara yang perlu dikembangkan dengan maksimal dalam menangkal berbagai serangan udara.

Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa Nusantara berada di wilayah yang sangat rawan, hal ini dikaitkan dengan eskalasi konflik di kawasan Indo-Pasifik yang meningkatkan ketegangan antarnegara. Pada kondisi ini kita harus kembali mengingat dasar wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan (negara maritim), sehingga diperlukan adanya peningkatan besar dalam matra laut dan udara sebagai langkah awal mencegah perkembangan konflik yang ada. Kondisi ini mengingatkan perkembangan konflik di kawasan yang beralih pada kedua matra tersebut, dalam kondisi ini kita mengingat rudal balistik jarak jauh yang dimiliki oleh Cina serta adanya pengembangan kapal selam nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Australia, dan Inggris di kawasan Indo-Pasifik. Keadaan ini bukan berarti untuk menutup atau mengesampingkan perkembangan suatu matra, namun dalam kondisi ini sistem pertahanan berbasis ancaman perlu diperhatikan walaupun akan menelan anggaran yang sangat besar. Perkembangan teknologi militer melalui sistem pertahanan cerdas menjadi aspek utama yang perlu dicapai oleh Ibu Kota Nusantara dalam waktu dekat, mengingat wilayah ibu kota masuk dalam radius tiga kapabilitas militer utama Amerika Serikat dan Cina.

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko memang menjelaskan bahwa sistem pertahanan berbasis ancaman yakni dengan mengidentifikasi potensi lawan menelan anggaran yang sangat besar, sehingga Moeldoko menjelaskan bahwa basis kapabilitas lebih realistis dengan salah satu contohnya keberadaan Kodam di Nusantara yang bersifat mendesak mengingat perbatasan darat Indonesia dan resiko mengalami agresi serentak dari berbagai medan (Kantor Staf Presiden, 2023). Jenderal

TNI Andika Perkasa menjelaskan bahwa Nusantara memiliki kerentanan yang sangat tinggi, terutama terhadap ancaman yang berasal dari udara. Oleh karena itu diharapkan bahwa pemindahan ibu kota harus dibarengi dengan perubahan paradigma pertahanan, karena selama ini dirasa bahwa pertahanan Indonesia cenderung terlalu berfokus pada pertahanan darat dengan strategi pertahanan yang mendalam. Pada saat ini TNI berada dalam posisi untuk mempersiapkan sistem pertahanan di Ibu Kota Nusantara, terutama dalam aspek pengajuan anggaran untuk pembelian alau utama sistem senjata. Pada keadaan ini Andika menjelaskan bahwa ancaman terbesar memang pada serangan udara karena TNI masih kekurangan alat pertahanan, namun kekurangan ini tidak hanya terjadi di matra udara melainkan juga pada matra darat dan laut (Judhariksawan & Daud, 2022).

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan kajian mengenai konsep pertahanan cerdas dalam penguatan sistem pertahanan Ibu Kota Nusantara, kondisi ini melihat pilar kekuatan Cina dan Amerika Serikat sangat memungkinkan kawasan Asia Tenggara menjadi zona penyangga (*buffer zone*) atau bahkan medan peperangan negara-negara dominan. Konsep *smart defence* ini merupakan sistem pertahanan yang menyinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, konsep tersebut menonjolkan aspek diplomasi, perkembangan teknologi, hingga memanfaatkan industri pertahanan nasional (BRIN, 2024). Perkembangan geografi militer dan karakteristik ancaman menyebabkan berbagai penyesuaian, seperti halnya Ibu Kota Nusantara yang memiliki kerawanan tinggi terhadap ancaman udara. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah strategi komprehensif yang tidak terpisahkan dari sistem pertahanan semesta, defensif aktif, hingga pertahanan berlapis. Zona pertahanan berlapis sendiri membentuk tiga zona yaitu daerah penyangga, zona pertahanan utama (*counter offensive*), hingga zona perlawanan yang merupakan wilayah Indonesia sendiri (Maharani, 2022). Proses pembagian zona tersebut menjadi salah satu upaya strategi pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia, selain itu kita pahami bahwa zona penyangga merupakan sebuah konsep yang penting dalam pembahasan mengenai pertahanan dan keamanan suatu negara.

Strategi dan sistem pertahanan di Ibu Kota Nusantara dengan pusat ancaman udara menekankan perkembangan melalui Sistem Pertahanan Udara Nasional (Sishanudnas), Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas untuk memelihara keamanan udara melalui Sishanudnas. Pada

pengembangan sistem pertahanan udara di Ibu Kota Nusantara ini mengalami beberapa tantangan seperti belum adanya sinergitas anggaran pertahanan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, belum adanya daya getar pertahanan udara di kawasan, keterbatasan kepemilikan alutsista yang modern, hingga belum adanya keterpaduan yang baik dalam organisasi Koopsudnas TNI Angkatan Udara. Strategi pertahanan udara Ibu Kota Nusantara perlu terintegrasi dengan adanya daya tangkal, daya tahan, dan daya getar pertahanan, yang mana hal ini berguna dalam melindungi Ibu Kota Nusantara dari berbagai potensi ancaman seperti spionase, serangan pesawat tempur, hingga serangan rudal dari negara lain. Selain itu, diperlukan pula beberapa infrastruktur pendukung yang canggih seperti alutsista dalam penginderaan jauh, pesawat tempur, sistem pertahanan rudal balistik, sarana komunikasi dan informasi, memperkuat pertahanan siber, meningkatkan sinergitas organisasi dan sumber daya manusia, serta memperkuat adanya interoperabilitas antar matra dan peningkatan kerja sama luar negeri (Sapuan, 2023).

Pengembangan sistem dan strategi pertahanan Nusantara melalui *smart defence system* merupakan perwujudan dari pemikiran realisme defensif, di mana Indonesia lebih berfokus untuk menjaga kedaulatan wilayah mereka dari berbagai potensi ancaman yang ada daripada meningkatkan aktivitas militer yang dapat mengganggu *status quo* di kawasan. Kondisi yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik sudah cukup buruk terlihat dari sengketa di Laut Cina Selatan dan benturan kepentingan di antara negara-negara besar, sehingga situasi yang berkembang di kawasan adalah adanya berbagai aktivitas militer, sengketa wilayah dan sumber daya alam, hingga berbagai upaya diplomasi dan perjanjian yang dilakukan untuk meredam konflik yang terjadi. Keputusan terkini pengembangan sistem pertahanan Nusantara melalui berbagai matra yang ada dilihat sebagai upaya *self-help* Indonesia dalam menghadapi kondisi anarki di kawasan, sehingga dengan ini Indonesia lebih berfokus untuk meningkatkan sistem dan alat pertahanan yang dimilikinya sebagai infrastruktur keamanan bagi Ibu Kota Nusantara yang baru. Keputusan ini menjadi cukup bijak mengingat posisi geografis Ibu Kota Nusantara yang mendorong adanya upaya pertahanan lebih yang perlu dilakukan oleh Indonesia, mengingat posisinya yang semakin mendekati berbagai sumber potensi ancaman yang ada.

Simpulan

Pemindahan ibu kota ke Nusantara didasari oleh berbagai alasan yang merujuk pada upaya pemerataan pembangunan nasional, pemindahan ibu kota ini dilatarbelakangi oleh kondisi Jakarta yang dianggap telah terlalu “sibuk” sebagai ibu kota Indonesia. Berbagai permasalahan muncul sehingga pemindahan ibu kota dianggap sebagai opsi yang baik dalam meningkatkan aspek sosial, ekonomi, pertahanan, hingga pembangunan nasional. Keputusan pemindahan ibu kota ke Nusantara disahkan pada tahun 2019 yang memindahkan ibu kota Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur, secara geografis wilayah yang disiapkan sebagai ibu kota baru tepat berada di tengah-tengah wilayah Indonesia dengan beberapa kondisi lain yang diperhatikan. Pada kondisi ini ibu kota suatu negara dikenal sebagai wilayah pusat yang sangat vital, hal tersebut dikarenakan ibu kota negara menjadi pusat dari kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota ke Nusantara menjadi salah satu kebijakan yang dipenuhi beberapa permasalahan seperti dalam aspek pertahanan dan keamanan.

Secara aspek geopolitik, Ibu Kota Nusantara berada di tengah-tengah kawasan Indo-Pasifik dengan segala kompleksitas isu keamanan yang ada di kawasan tersebut. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina, perkembangan aliansi militer seperti AUKUS dan Quad, sengketa teritorial di kawasan Laut Cina Selatan, hingga perkembangan kejahatan transnasional menjadi resiko dari aspek geostrategi yang dimiliki Ibu Kota Nusantara. Ibu kota Nusantara pada saat ini menjadi *Center of Gravity* yang baru bagi Indonesia, sehingga diperlukan sebuah sistem pertahanan yang memampuni untuk dapat memastikan aspek keamanan di ibu kota Indonesia yang baru. Strategi pertahanan yang ditingkatkan merujuk pada sistem pertahanan cerdas (*smart defense*), yang mana hal ini merupakan sinergitas aktif di antara perkembangan ancaman militer dan non-militer, perkembangan diplomatik, hingga keterkaitan dengan teknologi dan sistem informasi. Selain itu, Ibu Kota Nusantara mengalami perubahan paradigma pertahanan. Kondisi ini terjadi dikarenakan potensi ancaman berkembang dan muncul dari matra udara dan laut, yakni dengan ancaman senjata militer Amerika Serikat dan Cina serta adanya rencana pengembangan kapal selam nuklir oleh Australia dan sekutu. Oleh karena itu, Indonesia melihat bahwa pengembangan sistem berlapis dan pertahanan udara perlu diutamakan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Implikasi secara geopolitik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi geografis Ibu Kota Nusantara berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh *decision makers* di Indonesia, kondisi tersebut mengingat pemilihan kawasan ibu kota baru yang berada di tengah wilayah Indonesia namun semakin mendekat ke sumber potensi ancaman di kawasan. Kompleksitas isu keamanan yang berada di kawasan Indo-Pasifik memberikan dampak dalam upaya pemindahan yang terjadi, sehingga dengan ini Indonesia perlu memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan yang ada mengingat ibu kota sebuah negara akan menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan. Kondisi ini didasari oleh konsep *Center of Gravity* yang mulai melekat pada Ibu Kota Nusantara, yakni segala bentuk pertahanan dan keamanan menjadi sesuatu yang sangat vital mengingat Nusantara akan menjadi pusat kekuatan baru bagi Indonesia. Pengembangan sistem dan strategi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia telah sesuai dengan kompleksitas keamanan yang terjadi di sekitarnya, yang mana transisi bentuk ancaman berusaha diatasi oleh Indonesia melalui *smart defense system* dan mulai memperhatikan matra udara dan laut sebagai penyesuaian paradigma pertahanan.

Daftar Pustaka

- Antara News. (2019, August 26). *Pengamat: Pemindahan ibu kota ke Kaltim secara geopolitik sudah tepat*. Retrieved from Antara News: <https://www.antaraneews.com/berita/1030566/pengamat-pemindahan-ibu-kota-ke-kaltim-secara-geopolitik-sudah-tepat>
- Art, R. J., & Jervis, R. (2016). *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, The Western Political Quarterly, 13th Ed*. New York: Pearson.
- Ashari, K. (2020). *Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asmara, C. G. (2019, August 26). *Ini 5 Alasan Jokowi Pilih Kaltim Jadi Ibu Kota Baru RI*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190826134234-4-94661/ini-5-alasan-jokowi-pilih-kaltim-jadi-ibu-kota-baru-ri>
- Bappenas. (2020, March). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- BRIN. (2024, March 6). *Perkuat Sistem Pertahanan IKN, BRIN Kaji Konsep Smart Defense Indonesia*. Retrieved from brin.go.id: <https://brin.go.id/dkp/posts/kabar/perkuat-sistem-pertahanan-ikn-brin-kaji-konsep-smart-defense-indonesia>
- Buzan, B. (1991). *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Harvester Wheatsheaf.

- Buzan, B., & Waever, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Clausewitz, C. V. (1984). *On War*. Princeton University Press.
- CNN Indonesia. (2020, January 28). *Menhan Malaysia soal Ibu Kota Baru RI: Untung Datang ke Kami*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200127204402-112-469219/menhan-malaysia-soal-ibu-kota-baru-ri-untung-datang-ke-kami>
- Creswell, J. W., & David, C. J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)*. Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2008). *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Deutsche Welle. (2022, October 24). *Korea Utara dan Korea Selatan Saling Lepas Tembakan di Perbatasan*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/dw/d-6365559/korea-utara-dan-korea-selatan-saling-lepas-tembakan-di-perbatasan>
- Ermaya. (2024). *Tantangan Geopolitik Indonesia: Mewaspada Perang Indo-Pasifik*. Retrieved from Kompas News: <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/10/16192691/tantangan-geopolitik-indonesia-mewaspada-perang-indo-pasifik?page=all>
- FISIP Universitas Indonesia. (2020, February 27). *Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara*. Retrieved from FISIP UI: <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/>
- Flint, C. (2021). *Introduction to Geopolitic. 4th Edition*. London: Routledge.
- Judhariksawan, J., & Daud, A. A. (2022). Defense Strategy of the New Capital City in Makassar Strait. *Journal of Maritime Research*, 19(3), 63-67.
- Kantor Staf Presiden. (2023, November 30). *Moeldoko: IKN Butuh Sistem Pertahanan Cerdas*. Retrieved from ksp.go.id: <https://www.ksp.go.id/moeldoko-ikn-butuh-sistem-pertahanan-cerdas.html>
- Kementerian Keuangan RI. (2022, January 25). *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*. Retrieved from djkn.kemenkeu.go.id: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html#:~:text=Ide%20pemindahan%20IKN%20pertama%20kali,mampu%20membangun%20IKN%20yang%20modern>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2013, February 28). kemlu.go.id. Retrieved from *Laut Cina Selatan*: https://kemlu.go.id/portal/id/read/101/halaman_list_lainnya/laut-china-selatan
- Khurana, G. S. (2017). *The 'Indo-Pacific' Concept: Restrospect and Prospect*. National Maritime Foundation.
- Lake, D. A. & Morgan, P. M. (1997). *Regional Organs: Building Security in a New World*. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.
- Lobell, S. E. (2010). *Structural Realism/ Offensive and Defensive Realism*. Oxford Research Encyclopedia of International Studies.
- Maharani, C. (2022). *Pertahanan Ibu Kota Negara: Strategi dan Gelar Militer*. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.
- Mardalis. (1995). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Mas'ood, M. (1989). *Studi Hubungan-International, Tingkat Analisis dan Teorisi*. Yogyakarta: Pusat antara Universitas-Studi Sosial UGM.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W. Norton & Company.
- Mets, D. R. (1999). *The Air Campaign: John Warden and the Classical Airpower Theorist*. Maxwell AFB, AL: Air University Press.
- Montrama, I. (2016). Rekonstruksi Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Indo-Pasifik Abad KE-21. *Journal of Internasional Studies*.
- Sapuan. (2023). Membangun Sistem Pertahanan Udara Ibu Kota Negara (IKN) yang Terintegrasi Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional. Lemhannas RI.
- Simorangkir, E. (2017, July 5). *Sekilas Sejarah Pemindahan Ibu Kota AS dari New York ke Washington DC*. Retrieved from finance.detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3548972/sekilas-sejarah-pemindahan-ibu-kota-as-dari-new-york-ke-washington-dc>
- Sorongan, T. P. (2022, January 20). *Bukan Cuma RI, 7 Negara Pindahkan Ibu Kota Negara*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220120113856-4-308977/bukan-cuma-ri-7-negara-pindahkan-ibu-kota-negara>
- Sundari. (2024). *Strategi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Pemindahan Ibu Kota*. Retrieved from Kementerian Pertahanan RI: <https://www.kemhan.go.id/poahan/2024/07/11/strategi-pertahanan-negara-dalam-menghadapi-pemindahan-ibu-kota.html>
- Suryono, E., & Arisoendha, M. (1989). *Hukum Diplomatik, Keistimewaan, dan Kekebalannya*.
- Sutikno. (2007). *Perpindahan Ibu Kota Negara Suatu Keharusan atau Wacana (Pusat Studi Bencana)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Tertia, J., & Perwita, A. A. (2018). Maritime Security in Indo-Pacific: Issues, Challenges, and Prospects. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- Usman, A., & Sukma, R. (1997). *Konflik Laut China Selatan: Tantangan Bagi ASEAN*. Jakarta: CSIS.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. California: Addison-Wesley Publishing Company.